

EFEKTIVITAS PROGRAM MOTIVATOR KETAHANAN KELUARGA (MOTEKAR) DALAM MENINGKATKAN KETAHANAN KELUARGA DI PROVINSI JAWA BARAT

¹Laras Kidung Kadresaning Kapti

²Antik Bintari

³Jovanscha Qisty Adinda FA

¹Program Studi Administrasi Pemerintahan, Universitas Padjadjaran

²Departemen Ilmu Pemerintahan, Universitas Padjadjaran

³Program Studi Administrasi Pemerintahan, Universitas Padjadjaran

Email korespondensi: laras18002@mail.unpad.ac.id

Antikbintarsih

jovanscha@unpad.ac.id

Abstract

The Family Resilience Motivator Program (MOTEKAR) is a program from the Provincial Government of West Java through the Office of Women's Empowerment, Child Protection and Family Planning (DP3AKB) which is specifically aimed at building family resilience. This program started in 2014 based on West Java Regional Regulation Number 9 of 2014 Article 30 concerning Implementation of Family Resilience Development. In its implementation, Motekar carries out 6 stages of family assistance, namely identifying, motivating, mediating, educating, planning, and advocating for issues related to family resilience. This study aims to analyze, describe and find alternative efforts from the Motekar Program in increasing Family Resilience in West Java Province through the aspects of targeting accuracy, program outreach, program objectives and program monitoring. The results of this study indicate that the Motekar Program has been running in accordance with existing regulations, but this has not resulted in significant real action on community behavior. For 8 years the Motekar Program has not been able to increase the IKK (Family Quality Index) in West Java Province, which until now is still below the national average. In conclusion, Motekar cannot be said to be effective in increasing family resilience in West Java Province, because deficiencies are still found such as lack of monitoring in the field from the Guidance Team, number of human resources, coordination between institutions, a review is needed so that efforts to improve family resilience can run effectively.

Keywords: Program Effectivity, Family Resilience, Motekar, West Java Provincial Government

Abstrak

Program Motivator Ketahanan Keluarga (MOTEKAR) merupakan sebuah program dari Pemerintah Provinsi Jawa Barat melalui Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana (DP3AKB) yang di khususkan untuk membangun ketahanan keluarga. Program ini dimulai sejak tahun 2014 berlandaskan Perda Jabar Nomor 9 Tahun 2014 Pasal 30

tentang Penyelenggaraan Pembangunan Ketahanan Keluarga. Dalam implementasinya, Motekar melakukan 6 tahap pendampingan keluarga yaitu identifikasi, memotivasi, memediasi, mengedukasi, merencanakan, serta mengadvokasikan permasalahan yang berhubungan dengan ketahanan keluarga. Penelitian ini bertujuan menganalisis, mendeskripsikan serta menemukan upaya alternatif dari Program Motekar dalam meningkatkan Ketahanan Keluarga di Provinsi Jawa Barat melalui aspek ketepatan sasaran, sosialisasi program, tujuan program dan pemantauan program. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa Program Motekar sudah berjalan sesuai dengan peraturan yang ada, namun hal tersebut belum membuahkan aksi nyata perilaku masyarakat secara signifikan. Selama 8 tahun Program Motekar belum mampu meningkatkan IKK (Indeks Kualitas Keluarga) di Provinsi Jawa Barat yang sampai saat ini masih berada di bawah rata-rata nasional. Dalam kesimpulannya, Motekar belum dapat dikatakan efektif dalam meningkatkan ketahanan keluarga di Provinsi Jawa Barat, karena masih ditemukan kekurangan seperti kurangnya monitoring di lapangan dari Tim Pembina, jumlah SDM, koordinasi antar lembaga, diperlukan peninjauan ulang sehingga upayanya dalam meningkatkan ketahanan keluarga bisa berjalan dengan efektif.

Kata Kunci: Efektivitas Program, Ketahanan Keluarga, Motekar, Pemerintah Provinsi Jawa Barat

Latar Belakang

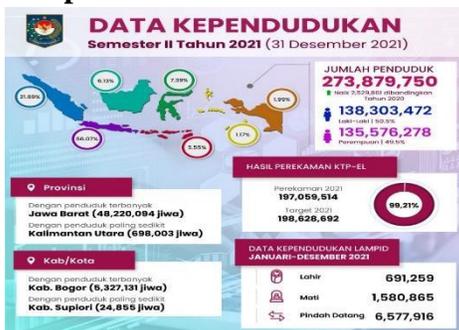
terkecil dalam masyarakat yang terdiri dari suami-istri dan anaknya, yang memiliki peranan penting dalam menghasilkan sumber daya manusia yang berkualitas (PERMEN P3A NO. 06 Tahun 2013 Pasal 1 Ayat 1). Membangun sebuah keluarga yang baik dan harmonis memerlukan kesiapan baik secara fisik, mental maupun materi, tentu hal ini bukanlah perkara yang mudah untuk dicapai. Berbagai masalah sosial dapat dilatar belakangi oleh ketidak-berfungsian keluarga sehingga menyebabkan permasalahan sosial, hingga ekonomi.

Menurut BKKBN (1992) dalam Sunarti (hal 02, 2014), pengertian ketahanan keluarga merupakan sebuah kondisi dinamik dimana dalam suatu keluarga mempunyai kemampuan fisik, materiil, psikis,

mental, spiritual, demi hidup mandiri sehingga keluarganya hidup dalam lingkungan yang harmonis dan memiliki tingkat kesejahteraan lahir dan batin. Dalam membangun sebuah ketahanan keluarga diperlukan upaya yang komprehensif, berkesinambungan, gradual, koordinatif dan optimal secara berkelanjutan. Pentingnya ketahanan keluarga untuk dijaga bukan semata-mata hanya membuat sebuah hubungan rumah tangga langgeng, tetapi hal ini berpengaruh terhadap tumbuh kembang seseorang karena keluarga merupakan tempat pertama dan utama untuk berkembang, ketahanan keluarga yang baik dapat menumbuhkan generasi penerus yang berkualitas, memiliki karakter yang baik dan memiliki daya saing yang cukup tinggi. Ketahanan keluarga pada sejatinya merupakan sebuah kondisi dinamik dimana suatu keluarga memiliki kekebalan dan ketangguhan atas fisik material,

psikis, spiritual untuk hidup mandiri serta mengembangkan diri dan keluarganya agar hidup dalam lingkungan yang harmonis serta mencapai kesejahteraan lahir batin. Kemendagri RI), Provinsi Jawa Barat dinobatkan sebagai provinsi dengan jumlah penduduk paling banyak di Indonesia yaitu sebanyak 48.220.094 jiwa. Berikut data kependudukan Tahun 2021 yang dirilis oleh Kemendagri RI:

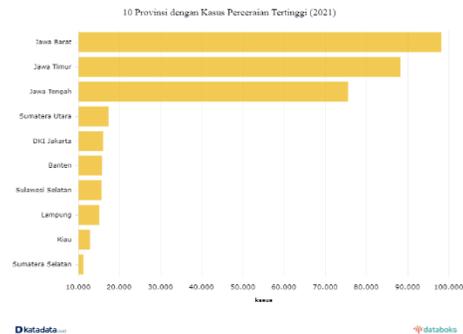
Gambar 1.1 Infografis Data Kependudukan Tahun 2021



Sumber: KEMENDAGRI RI, 2021

Disamping memiliki jumlah penduduk terbanyak, berdasarkan data di Badan Pusat Statistik kasus perceraian di Indonesia pada tahun 2021 mencapai 447.743 kasus meningkat 53.50% dari tahun 2020 dengan kasus perceraian tertinggi berada di Provinsi Jawa Barat yang mencapai 98.088 kasus yaitu 21.9% dari total kasus perceraian di Indonesia. Berikut grafik kasus perceraian yang ada di Indonesia, khususnya yang terjadi di Provinsi Jawa Barat:

Grafik 1.1 10 Provinsi dengan Kasus Perceraian Tertinggi 2021



Sumber: databoks, 2021.

Data dalam laman SI-KABAYAN Pengadilan Tinggi Agama Jawa Barat, penyebab perceraian yang paling banyak di Provinsi Jawa Barat pada tahun 2021 adalah perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yaitu sebanyak 52.476 kasus, disusul dengan faktor ekonomi sebanyak 41.012 kasus perceraian Gugatan lebih banyak dilayangkan oleh seorang istri, karena pada saat Covid-19 outbreaks banyak suami yang di PHK (Pemutusan Hubungan Kerja) dan kehilangan pekerjaannya. Pandemi Covid-19 ini berdampak besar bagi ketahanan keluarga di wilayah Jawa Barat faktor utamanya datang dari permasalahan ekonomi, ketidakseimbangan aktivitas dan waktu bersama keluarga, kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), perubahan pola komunikasi, faktor usia dalam membina keluarga. Meningkatnya angka perceraian tentu berdampak pada masalah sosial lainnya, seperti kemiskinan setelah perceraian, selain itu tidak dipungkiri konflik antar keluarga pasca perceraian dan berdampak bagi psikis

anak-anak yang dapat menjadi faktor penghambat tumbuh kembangnya.

Dalam membangun suatu ketahanan keluarga pihak yang terlibat bukan hanya dari lingkungan keluarga saja tetapi adapun campur tangan dari pemerintah. Sesuai dengan tujuan dari Pemerintah Negara Indonesia dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 bahwa tujuan Pemerintah Negara Indonesia melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Berdasarkan tujuan tersebut pemerintah memiliki kewajiban dalam melindungi, memajukan kesejahteraan dan mencerdaskan rakyatnya. Salah satunya pada ketahanan keluarga, oleh sebab itu demi mengoptimalkan upaya peningkatan ketahanan keluarga perlu adanya campur tangan dari pemerintah, posisi pemerintah dalam ketahanan keluarga adalah sebagai pemangku kebijakan melalui program-program kerjanya yang mendukung hal tersebut, khususnya pemerintah daerah agar pemerataan dari program lebih terjangkau masyarakat sehingga efek yang dirasakan akan lebih optimal. Salah satunya adalah Pemerintahan Provinsi Jawa Barat.

Dalam Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 09 Tahun 2014 Pasal 31, pelaksanaan pembangunan

ketahanan keluarga dilakukan demi mewujudkan dan meningkatkan kemampuan, kepedulian, serta tanggung jawab Pemerintah Daerah, keluarga, masyarakat, dan dunia usaha dalam menciptakan, mengoptimalkan keuletan dan ketangguhan keluarga. Dalam mewujudkan perda tersebut Pemerintah Provinsi Jawa Barat melalui Badan Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana (BP3AKB) membentuk sebuah program Motivator Ketahanan Keluarga atau yang disingkat dengan MOTEKAR Daerah yang dirancang berlangsung selama 4 tahun dari tahun 2014-2018, namun hingga saat ini program MOTEKAR masih terus berjalan. Pembentukan Program Motivator Ketahanan Keluarga (MOTEKAR) merupakan perintah Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 Tentang Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, aturan teknisnya adalah Peraturan Menteri Perlindungan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 6 Pasal 11 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Pembangunan Ketahanan Keluarga, yang ditindak lanjuti dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2014 Pasal 30 tentang Penyelenggaraan Pembangunan Ketahanan Keluarga dalam Perda. Adapun pelaksanaan teknisnya berdasarkan Peraturan Gubernur No. 55 Tahun 2018 Tentang Pelaksanaan Penyelenggaraan Pembangunan Ketahanan Keluarga. Program MOTEKAR merupakan program yang menyediakan tenaga motivator

ketahanan keluarga yang berasal dari masyarakat desa/kelurahan setempat yang memiliki kemauan, pengetahuan dan keinginan untuk memfasilitasi mengidentifikasi, memberikan motivasi, mediasi, mendidik, merencanakan dan mengadvokasi mengenai pemberdayaan keluarga yang mengalami kerentanan aspek fisik, ekonomi, psiko-sosial, dan sosial budaya untuk meningkatkan kualitas hidupnya agar lebih baik. Lalu Adapun Peraturan gubernur No. 55 Tahun 2018 Tentang Pelaksanaan Penyelenggaraan Pembangunan Ketahanan Keluarga menjadi landasan dalam operasional pelaksanaan pembangunan ketahanan keluarga di Provinsi Jawa Barat. Dalam merealisasikan program Motivator Ketahanan Keluarga (MOTEKAR) diperlukann sebuah pedoman umum dan petunjuk teknis penyelenggaraan pembangunan ketahanan keluarga, pedoman yang dijadikan sebagai landasan dalam pelaksanaan program MOTEKAR baik di dalam Pemerintah Daerah Provinsi, Kabupaten/Kota, Desa/Kelurahan dan masyarakat. Dalam tingkat provinsi Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Keluarga Berencana (DP3AKB) melaksanakan kewenangannya dalam mengkoordinasikan terkait dengan pembangunan ketahanan keluarga dengan seluruh pihak. Dalam pembentukan program Motivator Ketahanan Keluarga (MOTEKAR), Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan

Keluarga Berencana (DP3AKB) Provinsi Jawa Barat melakukan koordinasi dengan Tim Pembina Ketahanan Keluarga Provinsi yang dibentuk oleh Pemerintah Provinsi Jawa Barat yang terdiri dari instansi terkait seperti DP3AKB, lembaga pendidikan, dunia usaha, organisasi keagamaan, organisasi profesi dan masyarakat. Pembentukan ini dimulai dengan merekrut Pelatih MOTEKAR yang akan diberikan pelatihan (training for trainers). Para Pelatih MOTEKAR ini berfungsi sebagai tenaga pendamping MOTEKAR. Selanjutnya DP3AKB dan Tim Pembina Ketahanan Keluarga bekerja sama dengan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Kabupaten/Kota untuk melakukan sosialisasi mengenai Program MOTEKAR kepada organisasi sosial kemasyarakatan, organisasi keagamaan, LSM, Kepala Desa/Lurah serta instansi-instansi terkait lainnya. Hal ini bertujuan untuk memberikan pemahaman atas Program MOTEKAR sehingga dalam pelaksanaannya program tersebut berjalan sesuai fungsinya dan mendapat dukungan dari berbagai pihak.

Fungsi utama dari MOTEKAR adalah sebagai sebagai fasilitator kepada keluarga yang memiliki ketahanan keluarga yang rendah mengenai pemberdayaan keluarga sehingga dapat mengadvokasikan keluarga yang rentan mengenai pentingnya kepemilikan akta nikah, akta kelahiran dan akta lainnya yang menyatakan kelegalitasan sebuah keluarga. Selanjutnya mengenai

penguatan pola asuh anak sehingga tumbuh kembang anak berlangsung dengan baik, lalu mensosialisasikan mengenai pencegahan KDRT, perceraian, human trafficking (perdagangan manusia), pelecehan dan kekerasan seksual, HIV/AIDS.

Berdasarkan hasil Monitoring dan Evaluasi (Monev) MOTEKAR pada tahun 2020 lalu fokus program dalam permasalahan sosial diatas perlu menjadi aspek prioritas untuk dituntaskan demi mencapai target yang telah ditentukan. Karena permasalahan-permasalahan tersebut memiliki dampak yang sangat besar terhadap ketahanan keluarga di Provinsi Jawa Barat sehingga perlu ditangani lebih lanjut lagi. Namun terlihat dalam capaian kinerja dalam beberapa aspek penyebab kerentanan keluarga diatas, menunjukkan bahwa capaian kinerja tersebut belum sesuai dengan target yang telah ditentukan. Oleh sebab itu, perlu adanya peningkatan efektivitas penyelenggaraan program MOTEKAR yang dapat terukur dengan jelas terutama dari segi ketepatan sasaran program, sosialisasi program, tujuan program dan pemantauan program. Program MOTEKAR apabila terlihat dari ketepatan sasaran telah sesuai dengan rancangan dan tujuan program yang telah di tentukan. Namun, dalam aspek sosialisasi program dalam implementasinya masih banyak masyarakat yang belum mengetahui tentang adanya program MOTEKAR ini, adapun kendala lainnya yang dialami oleh para kader MOTEKAR ketika terjun langsung ke lapangan

yang terkendala oleh ketersediaan masyarakat untuk lebih terbuka akan permasalahan yang ada di keluarganya, karena permasalahan keluarga merupakan hal yang sensitif untuk dibicarakan.

Bagi sektor pemerintahan yang cakupan tujuannya cukup luas dibandingkan sektor privat, pengukuran efektivitas terhadap suatu program harus terukur secara jelas, harus dapat diukur sejauh mana capaian kinerja yang telah dilaksanakan untuk menghindari inefisiensi, pemborosan anggaran demi kepentingan publik. Berdasarkan hal ini, Subagyo Dalam Budiani (2007) menyatakan terdapat 4 (empat) aspek yang dapat mengukur efektivitas dengan statistik sederhana, yakni:

1. Ketepatan sasaran program, aspek ini digunakan untuk mengukur apakah target dan sasaran yang dituju dari suatu program telah sesuai dengan ketetapannya.
2. Sosialisasi program, aspek ini digunakan untuk mengukur sejauh mana kapabilitas pemangku kebijakan dalam melakukan sosialisasi program yang dibuatnya agar tersampaikan pada kelompok masyarakat yang tepat.
3. Tujuan program, aspek ini digunakan untuk mengukur apakah suatu program sudah terlaksana sesuai dengan tujuan yang ditetapkan sebelumnya.
4. Pemantauan program, aspek ini digunakan untuk meninjau bagaimana implementasi suatu program di lapangan agar pelaksanaannya sesuai dengan capaian yang telah ditentukan.

Berdasarkan latar belakang dan identifikasi masalah yang telah peneliti paparkan diatas, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut mengenai program MOTEKAR terhadap ketahanan keluarga yang berjudul **“Efektivitas Program Motivator Ketahanan Keluarga (MOTEKAR) Dalam Meningkatkan Ketahanan Keluarga di Provinsi Jawa Barat”**.

Metode

Jenis metode penelitian yang di gunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif. Penggunaan metode penelitian kualitatif dalam penelitian ini bertujuan untuk dapat mengeksplorasi, memahami serta memaparkan bagaimana efektivitas program Motivator Ketahanan Keluarga (MOTEKAR) dalam meningkatkan ketahanan keluarga di Provinsi Jawa Barat.

Teknik pengumpulan data yang digunakan peneliti dalam penelitian ini yaitu studi kepustakaan, studi lapangan seperti observasi, wawancara dan dokumentasi. Dalam menganalisis data peneliti menggunakan teknis reduksi data, penyajian data dan kesimpulan, peneliti juga menggunakan analisis SWOT yaitu Strength (Kekuatan), Weakness (Kelemahan), Opportunity (Peluang), Threat (Ancaman) selanjutnya data tersebut divalidasi menggunakan teknik member check, triangulasi sumber dan bahan referensi.

Hasil Penelitian dan Pembahasan:

Berdasarkan UU No 10 Tahun 1992 Ketahanan keluarga merupakan sebuah kondisi dinamik dimana suatu keluarga dapat memenuhi kebutuhan fisik maupun materinya tanpa membutuhkan bantuan orang lain. Pembangunan ketahanan keluarga merupakan salah satu acuan dari Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat No 9 Tahun 2014. Provinsi Jawa Barat melalui Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana (DP3AKB) Provinsi Jawa Barat membentuk sebuah program yang dikhususkan untuk meningkatkan ketahanan keluarga yaitu Motivator Ketahanan Keluarga (MOTEKAR) yang didirikan pada tahun 2014. Program MOTEKAR dirancang untuk mengidentifikasi, memberi motivasi, memediasi, mendidik, merencanakan, serta mengadvokasikan segala sesuatu yang berkaitan dengan pembangunan ketahanan keluarga dalam kehidupan masyarakat di Desa/Kelurahan yang ada di Provinsi Jawa Barat.

Berdasarkan hasil wawancara dengan pihak Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana (DP3AKB), dari 27 Kabupaten/Kota yang ada di wilayah Jawa Barat dalam implementasi program Motekar merekomendasikan wilayah Kabupaten Bandung sebagai wilayah dengan implementasi program terbaik dan Kabupaten Pangandaran sebagai wilayah dengan jumlah kasus terbanyak.

Efektivitas Program MOTEKAR dalam meningkatkan Ketahanan Keluarga di Provinsi Jabar Aspek Ketepatan Sasaran Program

Variabel pengukuran efektivitas yang dikemukakan oleh Subagyo dalam Budiani (2007) memiliki empat aspek pengukuran,

yang pertama adalah Ketepatan Sasaran Program. Dalam implementasi sebuah program, aspek ketetapan sasaran merupakan aspek yang penting untuk diperhatikan, apabila penetapan sasaran salah sudah pasti implementasi program nya pun tidak akan sesuai dengan ketetapan nya.

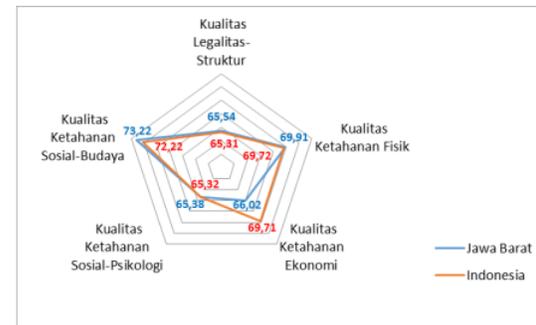
Latar belakang berdirinya Program Motekar di dasarkan pada kerentanan keluarga yang semakin meningkat di Jawa Barat dari segi perceraian, pernikahan anak, kekerasan pada anak dan perempuan, hingga tanda legalitas keluarga sehingga pemerintah Jawa Barat merasa bahwa perlunya ada campur tangan pihak ketiga dalam membantu menguatkan ketahanan keluarga. Sebagai provinsi dengan jumlah penduduk paling banyak di Indonesia, permasalahan ketahanan keluarga di Provinsi Jawa Barat seakan tidak ada habisnya. . Upaya Pemerintah Provinsi Jawa Barat dalam menangani permasalahan ketahanan keluarga ditandai dengan berdirinya Program Motekar sejak tahun 2014 lalu. Rendahnya tingkat ketahanan keluarga di Jawa Barat ini didukung oleh pernyataan dari Kepala Seksi Ketahanan Keluarga Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Provinsi Jawa Barat yang menyatakan bahwa:

“Jadi indeks ketahanan keluarga, indeks kualitas keluarga atau IKK Jabar itu masih dibawah rata-rata nasional diantaranya dari sisi aspek legalitas yang masih rendah kepemilikan akta kelahiran, kematian atau akta nikah. Dan tingginya angka perceraian dan lain-lain juga. Itu bukti bahwa masyarakat masih membutuhkan pendampingan keluarga. Sangat dibutuhkan.”

Berdasarkan hasil kumulatif dari ke 5 aspek, capaian IKK Provinsi Jawa Barat masih

berada dibawah Indonesia, hal tersebut dapat dilihat dalam tabel berikut:

Gambar 4.1 Capaian IKK Provinsi Jawa Barat



Sumber: Kemen PPPA-RI & BPS, 2021

Capaian IKK Provinsi Jawa Barat mengalami kenaikan 0.25 dari tahun 2019 yaitu 67.35 menjadi 67.6 namun capaian tersebut belum dapat meningkatkan capaian rata-rata IKK dari Indonesia. Untuk meningkatkan capaian IKK tersebut Pemerintah Jawa Barat perlu meningkatkan upayanya dalam mengatasi segala permasalahan yang mempengaruhi dari 5 aspek tersebut.

Ketidaktepatan sasaran dari perspektif masyarakat mengatakan bahwa mereka sesungguhnya tidak membutuhkan motivator. Dalam mengatasi rumah tangga (KDRT yang disebabkan oleh ekonomi, trafficking, legalitas, buruh migran, perceraian) sesungguhnya tidak begitu membutuhkan seorang Motivator, mereka lebih membutuhkan bantuan secara ekonomi untuk menyelesaikan masalah keluarga karena sebagian besar masalah keluarga dipicu oleh masalah ekonomi. Berdasarkan keterangan Motekar Wilayah B adalah sebagai berikut:

“Rata-rata warga kalau di data itu pengennya bantuan berupa materi berupa uang gitu, jadi kadang kita kasih bingkisan supaya mau di data atau di edukasi.”

Berdasarkan keterangan dari informan diatas menguatkan bahwa masyarakat sesungguhnya lebih membutuhkan bantuan materi daripada sekedar motivasi. Sehingga untuk mendekati masyarakat dan memberikan edukasi tentang ketahanan keluarga perlu diberikan iming-iming hadiah “uang duduk” sehingga mereka mau mengikuti kegiatan program-program Motekar.

Efektivitas Program MOTEKAR dalam meningkatkan Ketahanan Keluarga di Provinsi Jabar Aspek Sosialisasi Program Aspek kedua dalam pengukuran efektivitas menurut Subagyo dalam Budiyan (2007) adalah aspek sosialisasi program. Aspek Sosialisasi program ini digunakan untuk melihat sejauh mana kapabilitas pemangku kebijakan dalam mensosialisasikan program yang dimilikinya agar dapat tertuju kepada kelompok sasaran yang tepat. Sosialisasi program dirancang untuk memperkenalkan apa saja yang menjadi nilai, tujuan serta segala prosedur yang terdapat dalam program tersebut.

Dalam program Motivator Ketahanan Keluarga (MOTEKAR) kegiatan sosialisasi mengenai Program Motekar diberikan kepada beberapa pihak. Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana (DP3AKB) bersama Tim Pembina Keluarga pada awalnya memberikan sosialisasi kepada Pemerintah Kabupaten/Kota lalu berlanjut bekerja sama dengan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) atau instansi-instansi terkait di lingkungan Kabupaten/Kota kepada seluruh stake holder nya. Selain itu yang menjadi sasaran sosialisasinya adalah organisasi sosial kemasyarakatan, organisasi keagamaan, lembaga swadaya masyarakat, lembaga sosial, kepala Desa/Lurah.

Para anggota Motekar pada tahun saat tahun 2014 menerima informasi mengenai perekrutan program Motekar dari patugas-petugas di Kecamatan/Kelurahan masing-masing daerahnya dan hampir seluruh anggota yang saat ini menjadi anggota Motekar adalah yang sebelumnya sudah aktif menjadi kader-kader di daerahnya. Setelah menjadi anggota Motekar mereka diberikan peningkatan kapasitas untuk meningkatkan kemampuan pengetahuan dan keterampilan yang harus diikuti oleh seluruh anggota motekar. Berikut materi dari bimbingan teknis yang harus dipahami oleh anggota Motekar:

1. Pemahaman mengenai keluarga meliputi: fungsi keluarga, komunikasi suami istri, komunikasi orang tua-anak, pengetahuan kesehatan reproduksi;
2. Pemahaman dasar sosial kultural dan demografi;
3. Kemampuan dasar analisis kebutuhan (need analysis) keluarga;
4. Keterampilan berkomunikasi;
5. Kemampuan konseling dasar;
6. Keterampilan advokasi
7. Dalam setiap bimbingan teknis atau sosialisasi materi kepada anggota Motekar selalu dibarengi dengan pre-test dan post test sehingga pemahaman mereka terhadap materi-materi yang diberikan dapat terukur.
8. Dalam melakukan sosialisasi dan edukasi ke masyarakat, para anggota Motekar biasanya mereka selalu memperkenalkan diri dan menjelaskan mengenai apa itu Motekar dan fungsinya itu apa. Anggota motekar biasanya melakukan sosialisasi secara mandiri tanpa bantuan ataupun pendampingan dari pihak dinas. Menurut

Koordinator Wilayah Motekar Kabupaten B:

9. “Proses sosialisasi dilakukan secara mandiri dan tidak di dampingi, kita melakukan nya sesuai dengan perintah saat bimtek. Jadi kita lanjutkan saja sosialiasinya.”
10. Pihak dinas atau dari tim pembina motekar lainnya tidak mendampingi proses sosialisasi kecuali ada kegiatan yang cukup besar seperti gebyar pembuatan akta atau isbat nikah masal karena saat proses sosialisasi para anggota motekar terjun langsung secara intens dan personal kepada masyarakat wilayah-wilayah binaannya sehingga tidak dapat didampingi oleh pihak instansi. Para anggota Motekar akan menghubungi pihak instansi apabila membutuhkan pendampingan, ataupun apabila pihak DP3AKB memiliki acara terkait ketahanan keluarga akan selalu mengundang anggota Motekar.

Pelaksanaan sosialiasi tersebut harus dilakukan secara berkala. Dalam laporan setiap bulannya anggota Motekar sekurang-kurangnya harus melakukan sosialisasi sebanyak 8 kali. Namun jumlah tersebut tidak menentu karena kegiatan di setiap daerah berbeda-beda. Dalam menjalankan tugasnya anggota Motekar diwajibkan untuk mendokumentasikan segala kegiatan yang dilakukannya. Berikut dokumentasi kegiatan anggota Motekar dalam melakukan sosialisasi:

Gambar 4.2 Dokumentasi Sosialisasi Program Motekar



Sumber: Instagram @motekarjabar, 2021.

Berdasarkan pemahaman tersebut dapat terlihat masyarakat telah memahami dasar dari apa yang disampaikan oleh Tenaga Motekar di wilayahnya. Disamping warga yang memahami sosialisasi yang telah diberikan, tidak jarang juga mereka menemukan reaksi dan antusiasme masyarakat dalam mengikuti sosialisasi yang sangat beragam. Ada yang memberikan respon baik ada pula yang memberikan respon kurang baik.

Sosialisasi dan edukasi mengenai Ketahanan Keluarga telah dipahami secara materi oleh masyarakat namun hal tersebut belum menumbuhkan perilaku berupa aksi nyata dalam meningkatkan ketahanan keluarga. Koordinator Wilayah Motekar Kabupaten Pangandaran dan Kabupaten Bandung juga mengalami kejadian yang sama saat melakukan sosialisasi dengan warga binaannya, mereka menuturkan bahwa banyak masyarakat yang masih menganggap hal yang di edukasikan oleh mereka tidak sepenting itu. Dan menurutnya wilayah binaan juga berpengaruh atas penerimaan keberadaannya kader Motekar ini. Koordinator Wilayah Motekar Kabupaten C menyatakan bahwa:

“Terkait dengan antusiasme masyarakatnya, ada yang antusias ada juga yang tidak. Dan yang gak antusias itu alasannya karena mereka mungkin belum paham aja seberapa pentingnya yang di sosialisasikan. Contohnya banyak perkawinan yang tidak a menganggapnya ah n yang terdaftar sama



ngga , tetep punya akte walau Cuma nama ibu saja. Yang kaya gitu sangat berpengaruh, tapi pasti kita tetap edukasikan kerugiannya apa. Tapi karena di daerah kampung jadi agak susah, itu harus berusaha aja terus, kan gak semua warganya juga berpikiran kaya gitu ya.”

Kegiatan sosialisasi ini harus dilakukan dengan interaktif sehingga antusiasme warga dalam menghadiri sosialisasi ini lebih baik dan tidak mengharapkan bantuan berupa materi kembali. Serta memfokuskan bagaimana hasil dari sosialisasi tersebut dapat membuahkan hasil berupa aksi nyata dalam menerapkan seluruh materi mengenai Ketahanan Keluarga yang diberikan.

Efektivitas Program MOTEKAR dalam meningkatkan Ketahanan Keluarga di Provinsi Jabar Aspek Tujuan Program Selanjutnya menurut Subagyo dalam Budiyan (2007) aspek ketiga dalam pengukuran efektivitas adalah aspek tujuan program. Dalam menjalankan sebuah program, tujuan dari program tersebut berperan penting untuk menentukan arah dari output apa yang ingin dihasilkan dari program tersebut.

Mengacu dari Undang Undang dan Peraturan Pemerintah Jawa Barat, pada tahun 2014, pemerintah Jawa Barat mengesahkan PERDA JABAR Nomor 9 tahun 2014 tentang penyelenggaraan Pembangunan Ketahanan Keluarga. Sebagai amanah dari PERDA tersebut, dibentuk Program MOTEKAR yang merupakan kader pemberdayaan masyarakat yang berasal dari masyarakat desa/kelurahan setempat, yang memiliki pengetahuan, kemauan, dan kemampuan untuk memfasilitasi kegiatan pemberdayaan keluarga pra-sejahtera dan perempuan dalam meningkatkan kualitas hidupnya dan keluarganya agar hidup lebih baik lebih baik.

Tujuan dibentuknya program ini pada dasarnya adalah untuk memberikan edukasi kepada masyarakat mengenai pentingnya suatu ketahanan keluarga sehingga pada akhirnya diharapkan terciptanya keluarga sejahtera dan berkualitas.

Tujuan MOTEKAR terbagi menjadi 2 tujuan yaitu tujuan umum dan tujuan khusus. Tujuan umum MOTEKAR adalah menyatupadukan pola pembinaan keluarga dan pemberdayaan perempuan yang berorientasi pada peningkatan kualitas hidup sejahtera lahir dan batin yang melibatkan partisipasi masyarakat dan lembaga terkait dalam semua tingkatan. Sedangkan tujuan khusus dalam kebijakan program yang memfasilitasi kader pemberdayaan masyarakat sebagai tenaga MOTEKAR dalam pembangunan kesejahteraan keluarga di Jawa Barat antara lain:

- a. Menumbuhkembangkan prakarsa dari keluarga-keluarga yang mengalami berbagai kerentanan fisik, ekonomi, sosio-psikologi dan social budaya agar meningkatkan ketahanan keluarga dalam rangka membangun keluarga sejahtera lahir dan batin dalam kehidupan masyarakat desa atau kelurahan;
- b. Mengoptimalkan peran perempuan dalam ketahanan keluarga, baik dari aspek pendidikan, sosial, ekonomi, budaya, dan politik agar memiliki keberdayaan diri dalam kehidupan keluarga dan masyarakat;
- c. Meningkatkan efektivitas pemberdayaan keluarga agar dapat berperan mengembangkan uapaya-upaya dalam menertibkan aspek legalitas (identitas keluarga), penguatan pola asuh anak, perbaikan kesehatan ibu dan anak, penguatan ekonomi keluarga, pencegahan terjadinya kekerasan dalam rumah tangga dan human trafficking, perceraian, pelecehan seksual, narkoba, HIV/Aids;

d. Mengembangkan pola-pola pengkaderan tenaga MOTEKAR sebagai kader pemberdayaan masyarakat di tingkat kelurahan/desa untuk memfasilitasi berbagai permasalahan dalam keluarga pra-sejahtera;

e. Membangun keluarga sehat, terdidik sakinah, penuh kasih sayang dan terlindungi hak-haknya dalam kesatuan wilayah Desa/Kelurahan, sehingga menjadikan desa “Motekar” yang maju, sehat, kuat dan memiliki ketahanan sosial;

f. Mendorong sinergitas program MOTEKAR dengan program yang memiliki keterkaitan dengan ketahanan keluarga pada tingkatan pemerintahan provinsi dan kabupaten/kota di Jawa Barat;

g. Meningkatkan kapasitas pelaku masyarakat dan aparatur pemerintahan pada tingkatan desa/kelurahan di Jawa Barat.

Untuk menunjang kerja Motekar dalam mencapai tujuan, maka diterapkan sistem kerja yang terintegrasi yang disebut dengan Sistem Ketahanan Keluarga yang terbagi menjadi 3 subsistem yaitu: Input, Proses dan Output. Dalam proses input anggota motekar melakukan identifikasi dan inventarisasi pendataan masalah kerentanan melalui pemetaan keluarga, masyarakat dan daerah binaannya. Dalam tahap selanjutnya yaitu proses, anggota motekar menganalisis hasil identifikasi atas masalah yang ada di lapangan selanjutnya akan ditetapkan proses penanganan masalah tersebut sesuai dengan kebutuhan dari keluarga yang teridentifikasi bermasalah.

Hampir di setiap wilayah menghadapi permasalahan yang sama dalam mencapai tujuannya yaitu reaksi dari masyarakat yang menolak ketika masalahnya akan di dampingi oleh Anggota Motekar. Sehingga belum adanya mutual trust kepada pihak ketiga yang disini adalah Motekar untuk membantu menyelesaikan atau mendampingi

menghadapi masalahnya. Menurut anggota wilayah A, yang membuat belum sempurna adalah mindset atau pola pikir dari masyarakatnya itu sendiri, karena masih banyak yang belum aware bahwa keluarganya ini membutuhkan pertolongan dari pihak ketiga. Sehingga diperlukan kegigihan serta konsistensi akan mengedukasi masyarakat dan membuat mereka tergerak untuk menyelesaikan masalahnya.

Secara output bahwa tujuan Program ini adalah untuk meningkatkan tingkat ketahanan keluarga serta Indeks Kualitas Keluarga (IKK) di Provinsi Jawa Barat. Terlihat dalam capaian-capaian (lihat tabel 4.) dari beberapa aspek yang ditangani Motekar belum ada yang melampaui targetnya. Selain itu, Indeks Kualitas Keluarga (IKK) yang dimiliki Jawa Barat walaupun mengalami kenaikan dari tahun 2019 yang sebesar 67.35 menjadi 67.6 di tahun 2020, angka tersebut masih dibawah rata-rata nasional yaitu 68.13 pada tahun 2020.

Walaupun program Motekar sudah berjalan sejak tahun 2014 pihak Provinsi belum membuat presentase kenaikan tingkat ketahanan keluarga karena Motekar belum ada diseluruh wilayah yang ada di Jawa Barat sehingga presentase tersebut tidak bisa mewakili wilayah Jawa Barat dan mereka menyatakan bahwa mereka tidak bekerja untuk mengejar angka. Hal tersebut menimbulkan ketidakjelasan, sebagai sebuah program yang dibentuk oleh pemerintah yang cakupan tujuannya cukup luas, pengukuran efektivitas terhadap suatu program harus terukur secara jelas, harus dapat diukur sejauh mana capaian kinerja yang telah dilaksanakan untuk menghindari in-efisiensi, pemborosan anggaran demi kepentingan publik.

Efektivitas Program MOTEKAR dalam meningkatkan Ketahanan Keluarga di Provinsi Jabar Aspek Pemantauan Program Aspek yang keempat dalam pengukuran efektivitas menurut Budiani (2007) adalah aspek pemantauan program, pemantauan program digunakan untuk meninjau implementasi dari program di lapangan agar pelaksanaannya sesuai dengan capaian dan tujuan yang telah ditentukan. Pemantauan terhadap program Motekar dilakukan oleh DP3AKB Provinsi Jawa Barat beserta aparat pemerintah Kabupaten/Kota setempat yang tergabung dalam Tim Pembina Motekar.

Monitoring Program Motekar dilakukan melalui kegiatan pemantauan, pengawasan, evaluasi dan pelaporan terhadap pelaksanaan kegiatan serta tindak lanjut atas pelaporan dari anggota Motekar. dalam melakukan pemantauan DP3AKB memiliki prinsip-prinsip yang diterapkan yaitu objektif dan profesional, transparan, partisipatif, akuntabel, tepat waktu, berkesinambungan, berbasis indikator kerja (input, proses, output, outcome dan dampak).

Anggota Motekar melakukan 3 jenis pelaporan yaitu laporan rutin, peer review dan laporan akhir. Pelaporan tersebut di submit secara online serta dikirimkan juga dokumen fisiknya kepada Kantor DP3AKB Provinsi Jawa Barat yang terdapat di Kota Bandung. Untuk daerah yang jauh dari kantor DP3AKB Provinsi Jawa Barat, laporan tersebut akan dikirimkan via ekspedisi. Ketiga jenis laporan tersebut diunggah secara online dan terintegrasi dalam satu pintu yaitu melalui laman website sites.google.com/view/motekar.

Dalam pelaporan Anggota Motekar dituntut untuk selalu melaporkan setiap kondisi ketahanan keluarga yang ada di wilayah binaannya masing-masing. Proses

penyampaian data dan informasi nya meliputi perkembangan pada setiap kegiatan pelaksanaan program. Dalam penyusunan laporan tersebut para anggota Motekar telah diberikan format khusus, berikut materi yang harus dilaporkan oleh anggota Motekar:

1. Kegiatan yang sedang dilaksanakan;
2. Pencapaian sasaran dan target kegiatan yang sedang dilaksanakan;
3. Kemajuan dari pelaksanaan kegiatan saat penyusunan laporan;
4. Target dan realisasi biaya dari kegiatan yang sedang dilaksanakan;
5. Hambatan dan kendala yang dihadapi sebagai suatu permasalahan untuk mendapatkan penyelesaian masalahnya.

Pada laporan bulanan ini terdapat 6 aspek dengan materi dari pelaporan yang sama seperti gambar laporan bulanan mengenai kepemilikan Akta Nikah diatas yaitu, kepemilikan Akta Kelahiran, Akta Kematian, kerentanan dalam pola asuh anak, tingkat kesehatan keluarga rendah, tidak mampu menyekolahkan anak pada tingkat dasar dan menengah, keluarga buruh migran.

Selain itu saat melakukan kegiatan sosialisasi, identifikasi, pendampingan maupun kegiatan lainnya, anggota Motekar diwajibkan untuk mengunggah dokumentasi dari kegiatan tersebut melalui Instagram atau laman Facebook pribadinya. Kegiatan monitoring pada program Motekar lebih banyak dilakukan berdasarkan pelaporan saja, namun untuk monitoring atau pendampingan kepada Motekar saat kegiatan di lapangan masih jarang dilakukan oleh Tim Pembina dari Kabupaten/Kota hingga Provinsi.

Kegiatan monitoring dan evaluasi ini dilakukan setiap satu bulan sekali dan bertujuan untuk mengecek ulang data yang dilampirkan oleh masing-masing Anggota Motekar. Apabila terdapat wilayah yang

kasus ketahanan keluarganya paling mencolok akan di highlight oleh pihak DP3AKB untuk ditanyakan secara kebenarannya kepada anggota Motekar mengenai bagaimana kasus tersebut bisa tinggi, bagaimana penanganan di lapangannya, dan apa hambatannya di lapangan. Dalam menindaklanjuti kasus tersebut pihak DP3AKB jarang untuk mengecek secara langsung ke lapangan untuk melihat kondisinya, biasanya akan dilimpahkan kembali ke Pemerintah Kabupaten/Kota setempat untuk penyelesaiannya, kecuali memang dibutuhkan campur tangan dari Provinsi baru mereka akan ikut menanganinya.

Pemantauan program Motekar telah berjalan terstruktur sesuai yang ada didalam petunjuk teknis, namun pemantauan program secara langsung ke wilayah kerja anggota Motekar juga sangat diperlukan untuk tetap memastikan keadaan yang ada di lapangan sudah sesuai dengan apa yang ada di dalam pelaporan serta ini juga akan membantu meingkatkan angka capaian kinerja sesuai dengan yang telah ditentukan.

Analisa Strength, Weakness, Opportunity, Threat (S.W.O.T) Efektivitas Program Motivator Ketahanan Keluarga (MOTEKAR) dalam Meningkatkan Ketahanan Keluarga di Provinsi Jawa Barat Analisis SWOT (Strenght, Weakness, Opportunity, Threat) adalah suatu cara dalam mengidentifikasi secara sistematis untuk merumuskan strategi. Analisis SWOT ini bertujuan untuk memaksimalkan kekuatan (strength) dan peluang (opportunity), serta dapat meminimalkan kelemahan (weakness) dan ancaman (threat). Berikut ini penyajian hasil analisis SWOT terkait efektivitas Program Motivator Ketahanan Keluarga (MOTEKAR) dalam Meningkatkan Ketahanan Keluarga di Provinsi Jawa Barat.

Tabel 4.1 Tabel Analisi SWOT Efektivitas Program MOTEKAR dalam Meningkatkan Ketahanan Keluarga di Provinsi Jawa Barat

Sumber: Olahan Peneliti, 2022.

Upaya Alternatif yang dapat dilakukan dari hasil analisis (SWOT) terkait Efektivitas program Motivator Ketahanan Keluarga (MOTEKAR) dalam meningkatkan ketahanan keluarga di Provinsi Jawa Barat Berdasarkan pemaparan dari hasil analisis SWOT (Strength, Weakness, Opportuity, Threat) diatas, dapat digunakan oleh penulis untuk menyusun upaya alternatif untuk menyelesaikan masalah dalam Efektivitas Program Motivator Ketahanan Keluarga (MOTEKAR) Dalam Meningkatkan Ketahanan Keluarga di Provinsi Jawa Barat. Berikut upaya alternatif berdasarkan hasil dari analisis SWOT:

a. Strategi Strength-Opportunity (SO) : Strategi ini mendayagunakan kekuatan peran Pemerintah Provinsi Jawa Barat melalui

Program Motekar dalam meningkatkan ketahanan keluarga untuk memanfaatkan peluang semaksimal mungkin.

- Mempertahankan penentuan kelompok sasaran di lapangan anggota Motekar yang dilakukan dengan identifikasi langsung ke lapangan membuat potensi keluarga yang terbantu akan masalah ketahanan meningkat, karena mereka paling tahu keadaan di lapangan serta banyaknya masyarakat binaan yang sudah merasa terbantu.

- Ketahanan keluarga merupakan sebuah hal dasar yang dibutuhkan oleh seluruh masyarakat, dengan hal tersebut menunjukkan peluang Program Motekar untuk meningkatkan ketahanan keluarga akan berhasil mencapai tujuannya karena secara kapasitas Motekar telah dipilih melalui tahapan seleksi sehingga tidak sembarang orang dapat menjadi anggota serta dalam menjalankan tupoksinya Tenaga Motekar terus secara konsisten melaksanakan kegiatan sosialisasi minimal 8x dalam sebulan mengenai ketahanan keluarga di wilayah binaannya. Selanjutnya Dengan adanya rutinitas bimtek dan upgrading juga dapat mempermudah kesempatan untuk meningkatkan ketahanan keluarga.

- Landasan hukum mengenai tujuan program dan petunjuk teknis pelaksanaan telah tersusun dengan baik hal tersebut membuat pedoman pelaksanaan Motekar dalam mengidentifikasi, mengedukasi serta mengadvokasi di lapangan lebih jelas.

- Pelaporan satu pintu memudahkan tenaga motekar melaporkan pekerjaannya serta hasilnya pun dapat dilihat oleh seluruh orang, sehingga dapat dipantau capaiannya.

b. Strategi Strength-Threat (ST): Strategi ini mendayagunakan kekuatan Pemerintah Jawa Barat dalam mengatasi ancaman.

- Meningkatkan keterampilan dan kapasitas anggota tenaga motekar dalam mempersiapkannya menghadapi & mengenai karakter masyarakat yang beragam dengan memberikan pematerian serta bimbingan teknis. Dengan meningkatkan integritas mengenai pemberdayaan keluarga yang berbasis mutual trust akan membuat masyarakat lebih nyaman untuk terbuka dalam permasalahan keluarganya dan mau di dampingi oleh Tenaga Motekar.

c. Strategi Weakness-Opportunity (WO): Strategi ini diberlakukan atas peluang yang dimiliki oleh Pemerintah Provinsi Jawa Barat untuk meminimalisir kelemahan yang ada.

- Menambahkan jumlah SDM Tenaga Motekar dan wilayah binaannya karena saat ini Ketahanan Keluarga merupakan sebuah kebutuhan dasar yang harus dimiliki oleh seluruh keluarga sehingga semakin banyaknya SDM dan wilayah binaannya akan semakin banyak potensi masyarakat yang terbantu.

- Merumuskan capaian kinerja secara spesifik dari Program Motekar sehingga dalam pelaksanaan program lebih terfokus pada tujuan program meningkatkan ketahanan keluarga.

- Merumuskan SOP tentang pemantauan di lapangan yang melibatkan Tim Pembina Motekar secara rutin, dalam SOP tersebut memuat alur koordinasi dan tanggung jawab masing-masing pihak Tim Pembina.

- Meninjau ulang keputusan pemotongan honorarium Tenaga Motekar yang sesuai dengan bobot kerja yang di lapangan.

- Strategi Weakness-Threat (WT): Strategi ini digunakan sebagai kegiatan yang dilakukan sebagai tindakan pencegahan atas kelemahan dari Program Motekar dalam

meningkatkan ketahanan keluarga di Provinsi Jawa Barat serta untuk menghindari berbagai ancaman yang ada.

- Berkoordinasi dengan Pemerintah Kabupaten/Kota/OPD-OPD di daerah setempat dalam melakukan pemantauan program secara langsung di lapangan untuk memastikan program ini berjalan efektif dan efisien sesuai dengan aturan yang berlaku.

- Bermitra dengan lembaga-lembaga terkait seperti KUA, Disdukcapil, Pengadilan Agama, dan lembaga lainnya untuk mempermudah proses pelaksanaan advokasi/penanganan mengenai ketahanan keluarga.

Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian di lapangan dapat disimpulkan bahwa efektivitas Program Motivator Ketahanan Keluarga (MOTEKAR) dalam upaya meningkatkan ketahanan keluarga di Jawa Barat adalah sebagai berikut:

1. Ditinjau dari aspek ketepatan sasaran program, Program Motekar menetapkan sasaran programnya berdasarkan hasil dari observasi anggotanya di lapangan. Berbekal dari rangkaian informasi dan edukasi dari bimbingan teknis yang mereka ikuti, mereka mengidentifikasi kelompok masyarakat manakah yang membutuhkan pendampingan. Hal ini cukup baik dalam menentukan kelompok sasaran yang cocok, karena merekalah yang paling tahu serta langsung mengobservasi ke wilayah-wilayah yang terdapat permasalahan ketahanan keluarga. Namun, masyarakat sesungguhnya lebih membutuhkan bantuan materi daripada sekedar motivasi. Sehingga untuk mendekati masyarakat dan memberikan edukasi tentang ketahanan keluarga perlu diberikan iming-iming hadiah “uang duduk” sehingga mereka mau mengikuti kegiatan program-program Motekar.

2. Ditinjau dari aspek sosialisasi program, Program Motekar di sosialisasikan kepada berbagai pihak mulai dari sosialisasi kepada Pemerintah Kabupaten/Kota lalu berlanjut bekerja sama dengan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) atau instansi-instansi terkait di lingkungan Kabupaten/Kota kepada seluruh stake holder nya. Selain itu yang menjadi sasaran sosialisasinya adalah organisasi social kemasyarakatan, organisasi keagamaan, lembaga swadaya masyarakat, lembaga sosial, kepala Desa/Lurah. Para anggota Motekar pun mengetahui informasi mengenai perekrutan anggota dari Desa/Lurah setempat. Sebelum terjun ke masyarakat anggota motekar diberikan pembekalan, edukasi serta bimbingan teknis mengenai ketahanan keluarga dan bagaimana caranya beradapan langsung dengan warga. Dalam implementasinya program Motekar melakukan sosialisasi kepada masyarakat minimal 8x selama sebulan. Namun berdasarkan hasil penelitian di lapangan, para anggota Motekar melaksanakan sosialisasi tersebut lebih dari 8x. dikarenakan sosialisasi yang biasanya dilakukan itu mengikuti kegiatan yang ada di posyandu/ yang ada di wilayah binaannya. Dalam melakukan proses sosialisasi ini anggota Motekar tidak di damping oleh pihak Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana ataupun OPD dari wilayah setempat karena proses sosialisasi yang di lakukan anggota Motekar lebih banyak bersifat personal. Mereka akan di damping oleh Tim Pembina apabila sedang mengadakan forum besar seperti gebyar pembuatan akta atau isbat nikah masal. Berjalannya sosialisasi program motekar ini sudah berjalan dengan cukup efektif, namun yang menjadi kendala dalam melakukan sosialisasi adalah banyak anggapan warga

yang mengharapkan bantuan berupa materi kepada anggota motekar, serta banyak juga warga yang belum mau terbuka mengenai permasalahan keluarganya karena masih dianggap sebagai aib dan tidak membutuhkan campur tangan dari pihak ketiga. Selain itu, sangat disayangkan bahwa program motekar ini hanya di sosialisasikan kepada daerah-daerah yang terdapat anggota Motekar di wilayahnya saja, sehingga masih banyak warga Jawa Barat yang belum mengetahui atas keberadaan Program Motekar.

3. Ditinjau dari aspek tujuan programnya, program motekar dibentuk atas tujuan untuk meningkatkan tingkat ketahanan keluarga pada aspek fisik, ekonomi, sosio-psikologi, pola asuh anak, perbaikan kesehatan ibu anak, penguatan ekonomi, pencegahan KDRT, human trafficking, perceraian di Jawa Barat dan secara khususnya untuk dapat meningkatkan angka IKK Jawa Barat. Namun setelah berjalannya program ini selama 8 tahun IKK Provinsi Jawa Barat masih di bawah rata-rata nasional. Hal ini menunjukkan bahwa Program Motekar belum cukup efektif untuk meningkatkan angka ketahanan keluarga di Jawa Barat.

4. Ditinjau dari aspek pemantauan program, Program Motekar di monitoring melalui kegiatan pemantauan, pengawasan, evaluasi dan pelaporan oleh Tim Pembina yang terdiri dari DP3AKB, Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Provinsi Jawa Barat/Kabupaten/Kota dengan melibatkan mitra terkait program Motekar. Monitoring didasarkan pada prinsip objektif dan professional transparan, partisipatif, akuntabel, tepat waktu, berkesinambungan. Dalam melakukan pelaporan anggota motekar diwajibkan untuk menginput 2 jenis laporan yaitu laporan rutin yang di submit oleh setiap individu perbulannya, dengan

melaporkan aktivitas atau kejadian apa saja yang terjadi mengenai ketahanan keluarga. Laporan tersebut dikirimkan secara online dan fisik. Laporan fisik dikirimkan melalui ekspedi ke DP3AKB Provinsi Jawa Barat di Kota Bandung. Sementara laporan online di submit pada sites.google.com/view/motekar. Jenis laporan selanjutnya laporan akhir yang disusun secara keseluruhan kegiatan program pada akhir tahun. Sebelum di kirimkan ke DP3AKB laporan tersebut harus di laporkan kepada pemerintah wilayah setempat, setelah diperiksa baru laporan tersebut bisa dikirimkan ke Provinsi. Selain laporan yang berbentuk dokumen, anggota Motekar juga diwajibkan mengunggah dokumentasi kegiatannya via Instagram atau Facebook. Untuk pemantauan langsung ke lapangan dari tim Pembina maupun provinsi tidak ada yang mendampingi kecuali ketika ada acara yang mengundang forum besar. Dan semenjak Covid-19 pemantauan, rapat koordinasi dan tindak lanjut atas pelaporan dilakukan via Zoom Meeting. Pihak DP3AKB dalam menindaklanjuti pelaporan dengan melakukan cross check ulang kepada wilayah-wilayah yang memiliki kasus paling mencolok, untuk tindak lanjut setelahnya akan dikembalikan kembali ke Kabupaten/Kota untuk penyelesaian, apabila Provinsi dibutuhkan baru mereka akan turun tangan. Dari keseluruhan kegiatan pemantauan program motekar, dirasa sangat kurang pasalnya dari pihak Provinsi sangat jarang untuk memantau secara langsung proses identifikasi hingga advokasi yang dilakukan oleh anggota Motekar, hal tersebut menjadi salah satu pemicu bahwa tidaktercapaiannya kinerja motekar di lapangan pada setiap aspeknya karena kurangnya pantauan dari pembinaanya sehingga membuat pemantauan ini belum sepenuhnya dikatakan efektif.

5. Ditinjau berdasarkan aspek kekuatan (strength), dalam penyusunan program Motekar sudah solid dari segi landasan peraturan perundang-undangan dan telah memfasilitasi pembangunan ketahanan keluarga. Selain itu sumber daya manusia yang terlibatnya telah diseleksi dengan baik menggunakan kualifikasi yang sesuai dengan kebutuhan di lapangan. Lalu, proses sosialisasi yang telah dilakukan secara berkala dengan metode yang beragam seperti door to door, melalui posyandu atau forum besar lainnya sehingga membuat daerah binaannya lebih memahami betapa pentingnya ketahanan keluarga untuk dimiliki.

6. Ditinjau berdasarkan aspek kelemahan (weakness), kurangnya atas pemantauan program dari Tim Pembina hingga pihak Provinsi membuat program yang telah berjalan selama 8 tahun ini belum dapat sesuai dengan capaian dari tujuan program yang diharapkan yaitu untuk meningkatkan tingkah ketahanan keluarga di Provinsi Jawa Barat sehingga sampai saat ini pun IKK (Indeks Ketahanan Keluarga) Provinsi masih dibawah rata-rata Indonesia yaitu 67.6 untuk Jawa Barat dan 68.13 untuk Indonesia. Selain itu insentif kepada anggota motekar yang cukup rendah dan kurang sesuai dengan bobot kerja yang mereka lakukan. Sebelum pandemic insentif anggota Motekar sebesar Rp. 2.000.000,- namun dipangkas saat pandemic menjadi 1.200.000,- saja.

7. Ditinjau dari aspek peluang (opportunity), Program Motekar telah dibentuk dengan baik serta memiliki anggota yang sesuai dengan klasifikasinya, serta dalam melakukan identifikasinya tenaga motekar langsung terjun kelapangan sehingga peluang sasaran keluarga yang terbantu akan permasalahan ketahanan

keluarganya dapat meningkat. Selanjutnya dengan meningkatkan pemantauan program dari pihak provinsi atau SKPD setempat ketika melakukan identifikasi maupun sosialisasi di lapangan akan membuat program ini berjalan lebih terarah. Lalu, apabila terdapat penambahan SDM dalam setiap daerahnya sehingga mereka dapat bekerja lebih cepat dalam mengidentifikasi sasaran keluarga yang membutuhkan dan lebih menjangkau secara keseluruhan di daerah binaannya. Selain itu menambahkan SDM juga dapat menambah jangkauan daerah-daerah binaan lainnya di Jawa Barat.

8. Ditinjau dari aspek ancaman (threat), respon masyarakat terhadap anggota masyarakat masih banyak yang belum mau terbuka mengenai permasalahan keluarganya dan tidak membutuhkan bantuan dari pihak Motekar hal ini menghambat proses identifikasi, pendataan serta pendampingan atas permasalahan keluarganya. Selain itu anggapan warga yang apabila didatangi oleh anggota Motekar

Berdasarkan hasil penelitian mengenai efektivitas program motivator ketahanan keluarga (Motekar) dalam meningkatkan ketahanan keluarga di Provinsi Jawa Barat, program Motekar ini sudah berjalan dengan baik dalam menentukan sasaran programnya, namun dalam implementasinya di lapangan masih belum berjalan cukup efektif untuk meningkatkan ketahanan keluarga di Provinsi Jawa Barat. Berjalan dari tahun 2014 hingga saat ini, Program Motekar belum menghitung jumlah kenaikan angka ketahanan keluarga di Jawa Barat dikarenakan Motekar ini belum terdapat di seluruh wilayah di Desa/Kecamatan yang ada di Jawa Barat sehingga angka yang didapat tidak mewakili. Selain itu, Motekar belum

dapat meningkatkan Indeks Kualitas Keluarga (IKK) di Provinsi Jawa Barat karena nilai IKK nya tersebut masih di bawah rata-rata nasional.

References:

Semua referensi yang digunakan dalam Angka Perceraian Provinsi Jawa Barat Tahun 2021. Diakses di:

[https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2022/02/28/angka-perceraian-naik-paling-banyak-terjadi-di-jawa-barat#:~:text=Kasus%20perceraian%20di%20Jawa%20Barat,talak%20\(diajukan%20pihak%20suami\)](https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2022/02/28/angka-perceraian-naik-paling-banyak-terjadi-di-jawa-barat#:~:text=Kasus%20perceraian%20di%20Jawa%20Barat,talak%20(diajukan%20pihak%20suami).). Diakses pada 10 Mei 2022 Pukul 16.00.

Laporan Kinerja MOTEKAR, Form Pelaporan Kinerja Motekar. Diakses di: sites.google.com/view/motekar Diakses pada 11 Mei – 10 Januari 2022.

Program Motivator Ketahanan Keluarga. Diakses di: <https://dp3akb.jabarprov.go.id/ketahanan-keluarga/#>. Diakses pada 30 September – 03 Desember 2022

Jumlah Penduduk Kabupaten dan Kota di Jawa Barat. Diakses di: <https://jabar.bps.go.id/indicator/12/133/1/jumlah-penduduk-menurut-kabupaten-kota.html>

Dokumentasi Kegiatan Motekar. Diakses di: <https://instagram.com/motekar.jabar>

Budiani, N. W. (2007). Efektivitas Program Penanggulangan Pengangguran Karang Taruna "Eka aruna Bakti" Desa Sumera Kelod, Kecamatan Denpasar Timur, Kota Denpasar. *Jurnal Ekonomi dan Sosial Input*, 49-57.

Firdaus Saleh, A. R. (2014). Pedoman Umum Program Motivator Ketahanan Keluarga (MOTEKAR) di Jawa Barat.

Bandung: Badan Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana.

Sunarti, E. (2020, Mei 14). Rintisan Indikator Ketahanan Keluarga. Retrieved from IPB: <http://euissunarti.staff.ipb.ac.id/files/2020/10/KAJIAN-R-IKK-KPPPA-SHORT-VERSION.pdf>

Undang-Undang No. 1 Tahun 2004

Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 Tentang Kependudukan dan Pembangunan Keluarga

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan

Peraturan Menteri Perlindungan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 6 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Pembangunan Ketahanan Keluarga.

Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 19 Tahun 2014 Pasal 30 tentang Penyelenggaraan Pembangunan Ketahanan Keluarga

Peraturan Gubernur No. 55 Tahun 2018

Acknowledgment:

Penulis mengucapkan terima kasih kepada Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Provinsi Jawa Barat yang telah memberikan peluang serta informasi yang dibutuhkan dalam meneliti efektivitas Program Motekar dalam meningkatkan ketahanan keluarga di Provinsi Jawa Barat